

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki ribuan pulau, dan juga kondisi geografis yang menguntungkan. Letak Indonesia cukup strategis, karena diapit oleh 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta memiliki 2 samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Indonesia termasuk kedalam iklim tropis yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Indonesia merupakan negara yang terletak pada zona pertumbukan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng indo Australia dan lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Karena Indonesia terletak pada zona pertumbukan, maka menyebabkan timbulnya gejala bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Selain itu, iklim di Indonesia juga dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor serta angin puting beliung. Hal tersebut dapat menimbulkan kerentanan sosial bagi korban bencana. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan sosial kepada korban bencana agar terhindar dari resiko sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Dinas Sosial ini diperlukannya pencairan anggaran dana bantuan bencana alam. Dalam hal ini pemerintah tentu telah menyiapkan suatu anggaran bencana alam yang telah dianggarkan

sebelumnya. Pencairan anggaran dana bantuan sosial yang baik dan tepat sasaran sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, dan tepat sasaran.

Pencairan dana bantuan dapat dilakukan kurang dari satu hari. Untuk mencairkan dana bantuan sosial ini ada baiknya untuk mengetahui prosedur pencairan dana. Akan tetapi, jika pencairan dana tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, proses pencairan dana bisa saja berjalan secara tidak efektif dan efisien serta sistem pengendaliannya tidak terkendali dengan baik.

Dipatya (2015) mengatakan bahwa “bantuan sosial dapat berupa uang yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat, penerima dan besarnya pada saat APBD. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan”.

Pihak yang berwenang untuk menyalurkan dana bantuan bencana alam di Kota Padang adalah Dinas Sosial Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang merupakan salah satu kantor dinas yang berperan membantu walikota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Penyaluran bantuan bencana alam dan bantuan sosial merupakan bagian atau salah satu bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Padang. Bidang tersebut dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seksi yang bertugas dalam perlindungan sosial korban bencana alam. Prosedur penyaluran bantuan ini dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyaluran, dan pengendalian serta penyaluran bantuan harus tepat sasaran.

Sistem penendalian intern berguna memberikan jaminan terhadap kuliatas kinerja dinas secara keseluruhan, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan dinas dan tata kelola dinas yang baik. Untuk itu perlu diketahui apakah prosedur pecairan dana pada Dinas Sosial Kota Padang sudah memenuhi kaidah pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Prosedur Pencairan Dana Bansos Korban Bencana Alam di Dinas Sosial Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul dan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencairan dana bantuan sosial korban bencana alam di Dinas Sosial Kota Padang?

2. Apakah prosedur pencairan dana bansos tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi kaidah pengendalian internal ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pencairan dana bantuan sosial korban bencana alam di Dinas Sosial Kota Padang,
2. Untuk mengetahui apakah prosedur pencairan dana bansos tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi kaidah pengendalian internal.

1.4 Manfaat Penulisan

Magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pada organisasi pemerintah sehingga memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh bagi penulis sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja dan mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
2. Menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan.
3. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di dunia kerja pada masa yang akan datang.

Adapun manfaat yang diperoleh bagi universitas sebagai berikut :

1. Menciptakan SDM dengan keahlian professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Menjalin kerjasama serta hubungan baik antar kependidikan dengan organisasi/instansi.

1.5 Tempat Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Padang yang beralamat di Jl. Delima No.5, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 Januari s.d 28 Februari 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat, waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang penjelasan teoritis berupa pengertian prosedur, pengertian pencairan dana, pengertian SPP, SPM, SP2D, serta konsep dasar sistem pengendalian intern.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum, sejarah berdirinya Dinas Sosial Kota Padang, visi misi dan nilai dasar, tujuan, sasaran, strategi dan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dari Dinas Sosial Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai prosedur pencairan dana bantuan sosial korban bencana alam pada Dinas Sosial Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

